



## Implementasi Kebijakan Daftar Hadir Online terintegrasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

Rilla Anggriani Johan Lubis<sup>1)</sup>, Zainal Abidin Rengifurwarin<sup>2)</sup>, Hendry Selanno<sup>3)</sup>

Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Corresponding author: [anggriani\\_rilla@gmail.com](mailto:anggriani_rilla@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan daftar hadir online terintegrasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku dan dampaknya terhadap kedisiplinan kerja ASN. Kebijakan ini mengharuskan pegawai untuk menggunakan sistem fingerprint untuk mencatat waktu masuk dan pulang kantor. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa dimensi implementasi kebijakan, yaitu sosialisasi sistem fingerprint, penerapan fingerprint untuk waktu masuk dan pulang kantor, perekapan data kehadiran, dan penyerahan rekapan data kehadiran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara kepada para informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai BKD Provinsi Maluku telah menunjukkan kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan kewajibannya, baik dalam hal ketepatan waktu masuk, pulang kantor, maupun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu, kebijakan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya kedisiplinan dan memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Perekapan data kehadiran yang terintegrasi mempermudah proses evaluasi kinerja dan pemberian sanksi atau penghargaan yang adil bagi pegawai. Secara keseluruhan, kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan disiplin kerja ASN di BKD Provinsi Maluku.

**Kata kunci:** Kebijakan Daftar Hadir Online, Disiplin Kerja ASN, Sistem Fingerprint

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of the integrated online attendance policy at the Regional Civil Service Agency (BKD) of Maluku Province and its impact on ASN work discipline. This policy requires employees to use a fingerprint system to record arrival and departure times. The research identifies several dimensions of policy implementation, including the socialization of the fingerprint system, the use of fingerprints for arrival and departure times, attendance data recording, and the submission of attendance data records. A qualitative approach was employed, using interviews with informants directly involved in the policy's implementation. The results of the study indicate that most BKD employees in Maluku Province have shown good discipline in fulfilling their obligations, including punctuality in entering and leaving the office, as well as in performing their duties. Furthermore, this policy successfully increased employees' awareness of the importance of discipline and positively impacted employee performance. The integrated attendance data recording system facilitated the evaluation of performance and the fair awarding of sanctions or rewards for employees. Overall, the policy has proven effective in improving work discipline among ASN at BKD Maluku Province.*

**Key words:** Online Attendance Policy, ASN Work Discipline, Fingerprint System

### PENDAHULUAN

Disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aspek fundamental dalam menciptakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin ASN mencerminkan

kemampuan pegawai dalam memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan. Pelanggaran disiplin mencakup ucapan, tulisan, atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan, baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja, dengan tanggung jawab pengawasan berada pada atasan langsung. Pelanggaran ini tidak bersifat delik aduan sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran wajib ditindaklanjuti melalui pemeriksaan. Pembinaan disiplin meliputi pemberian sanksi ringan, sedang, hingga berat, dengan tujuan utama menjamin kelancaran proses kerja instansi.

Disiplin kerja ASN bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, melaksanakan tugas dengan optimal, menggunakan fasilitas instansi secara bijaksana, serta menghasilkan produktivitas tinggi. Tingkat disiplin yang baik berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan tugas dan capaian kinerja pegawai. Untuk meningkatkan kedisiplinan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku menerapkan sistem daftar hadir online yang terintegrasi sejak 2021. Sistem ini menggunakan teknologi biometrik seperti fingerprint dan pengenalan wajah, menggantikan metode manual yang sebelumnya kurang efektif. Sistem daftar hadir online tidak hanya mengukur kehadiran tetapi juga menjadi indikator tanggung jawab dan kinerja ASN.

Penggunaan daftar hadir online di BKD bertujuan memantau kehadiran pegawai secara objektif dan meningkatkan disiplin kerja. Sebelum penerapannya, pengawasan manual kerap menghadapi kendala seperti manipulasi data oleh oknum tertentu. Dengan sistem online, kehadiran ASN terpantau secara real-time, transparan, dan langsung terhubung dengan aplikasi lain, termasuk sistem tunjangan tambahan penghasilan (TPP). Pegawai yang terlambat atau tidak hadir dikenakan pengurangan TPP sesuai durasi pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2023.

Daftar hadir online memastikan ketepatan waktu masuk dan pulang kerja setiap ASN sesuai jam kerja yang ditetapkan. Ketentuan ini diterapkan dengan sistem biometrik yang merekam waktu kehadiran secara langsung dan memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk memantau kinerja pegawai. Selain meningkatkan akuntabilitas, sistem ini juga memungkinkan pengambilan keputusan terkait hukuman disiplin secara cepat dan tepat. Hal ini diharapkan mampu mendorong perilaku kerja yang lebih profesional di lingkungan ASN.

Kondisi disiplin ASN di BKD sebelum penerapan daftar hadir online masih tergolong rendah. Ketidaktepatan waktu masuk dan pulang kerja menjadi isu utama akibat kurangnya pengawasan yang efektif. Dengan penerapan sistem baru, setiap pegawai diwajibkan melakukan absensi pada waktu tertentu, dan pelanggaran akan tercatat secara otomatis. Sistem ini memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan ASN serta menjadi instrumen evaluasi bagi pimpinan untuk menilai kinerja pegawai secara objektif.

Penerapan daftar hadir online di BKD tidak hanya meningkatkan disiplin tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penggunaan teknologi memungkinkan pemantauan langsung, mengurangi risiko manipulasi data, dan mempercepat proses perekapan kehadiran. Implementasi ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang menuntut tingkat kedisiplinan tinggi di lingkungan ASN sebagai bagian dari komitmen menuju birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Selain itu, sistem ini memiliki dampak langsung terhadap kinerja pegawai. Kehadiran yang tepat waktu mencerminkan tanggung jawab ASN terhadap tugas dan fungsi mereka. Penggunaan daftar hadir online juga mempermudah proses evaluasi, pemberian penghargaan, maupun penegakan sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan. Penerapan sistem ini di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku menjadi langkah strategis dalam menciptakan budaya kerja yang disiplin.

Daftar hadir online berbasis biometrik memberikan jaminan bahwa kehadiran ASN tidak dapat diwakilkan, sehingga akurasi data lebih terjamin. Transparansi sistem ini juga memungkinkan pimpinan memantau langsung tingkat kehadiran pegawai dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, integrasi sistem dengan aplikasi lain mempermudah penghitungan tunjangan dan sanksi secara otomatis, sehingga efisiensi pengelolaan kepegawaian meningkat.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sistem daftar hadir online membantu mengatasi berbagai kendala yang sebelumnya terjadi pada metode manual. Kendala seperti manipulasi data dan ketidaktepatan waktu rekapan kini dapat diatasi dengan sistem yang terintegrasi. Dengan implementasi ini, ASN diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, keberhasilan kebijakan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komunikasi, sumber daya, sikap pegawai, dan struktur birokrasi. Efektivitas penerapan daftar hadir online memerlukan dukungan dari semua pihak untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan. Penguatan dalam faktor-faktor ini akan membantu mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih baik.

Fenomena kedisiplinan ASN, termasuk waktu masuk dan pulang kerja, menjadi perhatian penting bagi BKD. Dengan adanya sistem daftar hadir online, pelanggaran disiplin dapat diminimalisir, dan tingkat kepatuhan pegawai dapat terus ditingkatkan. Implementasi kebijakan ini mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional.

Penelitian tentang implementasi kebijakan daftar hadir online terintegrasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku menjadi penting dilakukan karena disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu faktor krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Disiplin kerja ASN tidak hanya berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas kinerja individu, tetapi juga pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sebelum diterapkannya sistem daftar hadir online, kedisiplinan ASN di BKD masih tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh ketidaktepatan waktu masuk dan pulang kerja, serta lemahnya pengawasan terhadap kehadiran pegawai. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas kerja dan akuntabilitas pelayanan publik.

Penerapan daftar hadir online yang berbasis teknologi biometrik merupakan langkah strategis dalam mengatasi kelemahan pada sistem manual sebelumnya, seperti manipulasi data dan sulitnya memantau kehadiran pegawai secara real-time. Selain itu, sistem ini menjadi alat penting untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, karena data yang tercatat secara otomatis dan transparan mempermudah proses evaluasi, penegakan sanksi, serta penghargaan bagi ASN. Dengan demikian, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat keberhasilannya.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks reformasi birokrasi, di mana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme ASN. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya BKD, dalam meningkatkan kedisiplinan kerja ASN dan memperbaiki tata kelola kepegawaian. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi instansi lain dalam menerapkan sistem serupa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat terkait fakta serta hubungan yang sedang diselidiki. Fokus penelitian adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan daftar hadir online dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku. Proses ini mencakup analisis situasi, kondisi, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut, yang kemudian disusun dalam bentuk tulisan sistematis.

Lokasi penelitian dilaksanakan di BKD Provinsi Maluku, dengan waktu pelaksanaan selama satu bulan, yaitu dari Oktober hingga November 2024. Lokasi ini dipilih karena BKD merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan disiplin dan kehadiran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Penelitian ini dirancang untuk memeriksa secara mendalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap kedisiplinan ASN.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan daftar hadir online. Informan meliputi Kepala BKD sebagai informan kunci, Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian sebagai informan utama, serta beberapa informan tambahan seperti Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan dua pegawai yang menangani data daftar hadir online. Total informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang, yang dianggap representatif untuk memberikan data dan informasi relevan terkait implementasi kebijakan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku merupakan faktor penting yang harus dijaga dan ditingkatkan guna mendukung kinerja instansi pemerintah. Disiplin kerja ASN dapat diukur dari berbagai dimensi, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam memasuki kantor. Ketepatan waktu ini menjadi indikator utama yang menunjukkan seberapa tinggi disiplin kerja seorang ASN. Pada dasarnya, disiplin kerja mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, baik terkait dengan waktu masuk maupun waktu pulang kantor. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan disiplin, pimpinan BKD Provinsi Maluku bertanggung jawab untuk secara konsisten mendorong ASN agar selalu tepat waktu dalam menjalankan tugasnya. Ketepatan waktu masuk kantor menjadi salah satu dimensi penting dalam menilai efektivitas sistem manajerial di instansi tersebut, serta menjadi cermin kinerja pegawai.

Tingkat ketepatan waktu ASN yang baik dapat berkontribusi pada kelancaran tugas dan prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap pimpinan di BKD diharapkan dapat memantau secara terus-menerus tingkat kehadiran ASN, serta memberikan dorongan kepada pegawai untuk tetap disiplin. Dalam hal ini, pimpinan BKD Provinsi Maluku telah berupaya untuk mendorong pegawai agar dapat mengatur waktu dengan baik, sehingga pengawasan terhadap disiplin ASN dapat terlaksana secara efektif. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, diketahui bahwa sebagian besar pegawai telah mampu menunjukkan kedisiplinan yang baik dalam hal ketepatan waktu masuk kerja. Meski demikian, masih ada beberapa pegawai yang mengalami keterlambatan dengan alasan tertentu seperti kemacetan, yang sering kali menjadi hambatan dalam mencapai kedisiplinan yang sempurna.

Pengukuran ketepatan waktu ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) juga menjadi salah satu dimensi yang tidak kalah penting. Ketepatan dalam melaksanakan tupoksi menggambarkan sejauh mana ASN dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Keberhasilan dalam menjalankan tupoksi dengan tepat waktu akan mempengaruhi kelancaran alur kerja, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Pimpinan BKD berperan penting dalam mendorong pegawai untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga produktivitas di instansi tersebut dapat meningkat. Dalam hal ini, implementasi kebijakan daftar hadir online terintegrasi telah membantu mengukur dan memonitor ketepatan waktu ASN dalam menjalankan tupoksi, baik dalam hal kehadiran maupun pelaksanaan tugas.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan adalah dengan penerapan sistem daftar hadir online yang terintegrasi. Sistem ini menggantikan metode manual yang sebelumnya sering kali menghadapi kendala seperti manipulasi data atau ketidaktepatan waktu pencatatan kehadiran. Dengan adanya sistem daftar hadir online yang berbasis teknologi biometrik, seperti fingerprint dan pengenalan wajah, pemantauan kehadiran ASN menjadi lebih akurat dan transparan. Penerapan sistem ini memungkinkan pimpinan untuk memantau kehadiran ASN secara real-time, baik dalam hal waktu masuk maupun waktu pulang kantor. Hal ini secara tidak langsung juga mempengaruhi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas mereka, karena setiap pelanggaran atau ketidaktepatan akan tercatat secara otomatis.

Selain itu, penerapan sistem daftar hadir online terintegrasi juga mempermudah proses

evaluasi kinerja pegawai. Setiap data kehadiran yang tercatat secara otomatis dapat digunakan untuk menentukan apakah ASN tersebut telah memenuhi kewajiban waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga memudahkan dalam proses pemberian sanksi atau penghargaan berdasarkan tingkat kedisiplinan yang tercatat. Berdasarkan wawancara dengan informan yang menangani data daftar hadir online, diketahui bahwa setelah penerapan kebijakan ini, tingkat kesadaran pegawai terhadap disiplin waktu telah meningkat. Rekap data kehadiran pun semakin baik, menunjukkan bahwa pegawai kini lebih sadar akan pentingnya disiplin waktu dalam mendukung kinerja mereka.

Penerapan kebijakan daftar hadir online yang terintegrasi juga memberikan dampak positif terhadap ketepatan waktu pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Hal ini terlihat dari peningkatan alur pekerjaan yang lebih efisien dan tanpa hambatan yang berarti. Dengan adanya sistem yang transparan dan akurat, ASN yang sebelumnya sering terlambat kini lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan sistem ini memberikan kemudahan dalam memonitor kinerja pegawai, serta membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan pemberian sanksi atau penghargaan. Keberhasilan implementasi sistem daftar hadir online ini menunjukkan bahwa teknologi dapat berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan kerja ASN.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan, sebagian besar ASN di BKD Provinsi Maluku telah menunjukkan kedisiplinan yang tinggi dalam hal waktu masuk dan waktu melaksanakan tupoksi. Penerapan kebijakan daftar hadir online terintegrasi telah membantu menciptakan kesadaran lebih baik di kalangan ASN untuk mematuhi aturan waktu yang berlaku. Meskipun ada beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti keterlambatan akibat kemacetan, namun secara keseluruhan, tingkat kedisiplinan ASN di BKD Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah kebijakan ini diterapkan.

Ketepatan waktu pulang kantor adalah salah satu aspek penting dalam menilai kedisiplinan pegawai, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku. Penilaian ini didasarkan pada sejauh mana pegawai meninggalkan tempat kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, wawancara dengan berbagai informan mengungkapkan bahwa sebagian besar pegawai BKD Provinsi Maluku telah mematuhi ketentuan waktu pulang yang telah ditetapkan. Kepala BKD Provinsi Maluku, Ibu Halimah T. Soamole, menyatakan bahwa data yang tercatat melalui sistem fingerprint menunjukkan bahwa tidak ada pegawai yang pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran tinggi dari pegawai dalam mengikuti ketentuan waktu yang berlaku.

Informasi serupa juga diperoleh dari Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, Bapak Israh Budi, yang menegaskan bahwa kebijakan daftar hadir online telah membantu memastikan ketepatan waktu pulang kantor pegawai. Dengan adanya sistem ini, tidak ada lagi pegawai yang pulang lebih cepat, karena setiap pegawai diwajibkan untuk melakukan fingerprint saat pulang kantor. Kebijakan ini tampaknya telah berhasil meningkatkan kedisiplinan pegawai, yang tercermin dari data kehadiran yang lebih baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini juga diamini oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Bapak James T. Leiwakabessy, yang mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, ketepatan waktu pulang pegawai di BKD sudah sangat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses pemantauan ketepatan waktu pulang kantor ini semakin diperkuat dengan adanya sistem daftar hadir online terintegrasi. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ibu Warda Bantam, menyatakan bahwa dengan menggunakan aplikasi daftar hadir online, ketepatan waktu pulang kantor pegawai dapat dipantau dengan mudah setiap harinya. Informasi ini membuktikan bahwa tidak ada lagi pegawai yang pulang lebih awal sebelum waktu yang telah ditentukan. Penerapan sistem ini juga memberi dampak positif terhadap pengawasan ketepatan waktu, serta mendukung terciptanya kedisiplinan yang lebih baik di kalangan pegawai.

Selain itu, wawancara dengan dua pegawai yang menangani data daftar hadir online



terintegrasi, Bapak Rivaldi Sahib dan Bapak Grenaldy Tahalele, mengungkapkan bahwa pengelolaan data kehadiran yang lebih terstruktur telah membantu meningkatkan kesadaran pegawai dalam mematuhi waktu pulang. Mereka melaporkan bahwa tingkat ketepatan waktu pulang pegawai kini telah membaik, dan hal ini tercermin dalam data perekapan yang semakin akurat. Kedua informan tersebut juga menyatakan bahwa penerapan kebijakan ini memberikan dampak langsung terhadap kedisiplinan pegawai, terutama dalam hal ketepatan waktu pulang kantor.

Berdasarkan data dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem daftar hadir online terintegrasi telah berhasil meningkatkan ketepatan waktu pulang pegawai di BKD Provinsi Maluku. Tidak ada lagi pegawai yang pulang lebih awal dari waktu yang ditentukan, yang sebelumnya menjadi salah satu masalah dalam pengelolaan kehadiran. Sistem ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam memantau ketepatan waktu, tetapi juga berperan penting dalam membentuk budaya disiplin yang lebih baik di lingkungan kerja.

Pembinaan disiplin kerja pegawai menjadi kunci untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang teratur, efisien, dan produktif. Pembinaan disiplin bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembinaan ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten, seperti Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. Mereka bertugas untuk menilai dan memberikan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, seperti keterlambatan dalam melaksanakan tugas atau ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan tupoksi.

Pemberian penghargaan dan sanksi juga merupakan bagian dari sistem pembinaan disiplin di BKD Provinsi Maluku. Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai yang menunjukkan kedisiplinan tinggi, baik dalam hal ketepatan waktu maupun pelaksanaan tupoksi. Sementara itu, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, seperti pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau sanksi lainnya. Kepala BKD Provinsi Maluku menjelaskan bahwa pemberian penghargaan dan sanksi bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan memberikan motivasi kepada pegawai untuk selalu berprestasi dan mematuhi aturan yang berlaku.

### **Implementasi Kebijakan Daftar Hadir Online Terintegrasi**

Implementasi kebijakan daftar hadir online terintegrasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku merupakan langkah strategis untuk memantau kehadiran ASN dengan menggunakan sistem fingerprint. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi masalah kehadiran yang tidak terpantau dengan baik, serta memastikan bahwa ASN masuk dan pulang kantor sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam penerapan kebijakan ini, tahap pertama yang dilakukan adalah sosialisasi sistem fingerprint kepada seluruh ASN di BKD. Sosialisasi ini penting agar setiap ASN memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem baru yang akan diterapkan. Melalui berbagai pertemuan dan rapat, informasi tentang cara penggunaan sistem fingerprint, waktu yang tersedia untuk absensi, serta manfaat dari kebijakan ini disampaikan kepada seluruh pegawai. Pimpinan dan staf yang bertanggung jawab memberikan penjelasan mengenai tujuan dari implementasi sistem ini, yakni untuk meningkatkan disiplin kerja ASN di lingkungan BKD.

Sosialisasi mengenai sistem fingerprint ini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui platform daring seperti Zoom, yang memungkinkan pegawai yang berada di lokasi berbeda untuk tetap mendapatkan informasi yang diperlukan. Informasi mengenai tata cara penggunaan fingerprint dan pentingnya kebijakan ini dalam meningkatkan disiplin kerja disampaikan oleh pimpinan dan petugas yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, seperti Kepala BKD Provinsi Maluku, Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, serta Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, diketahui bahwa sosialisasi ini telah berjalan dengan baik. Setiap ASN di BKD Provinsi Maluku kini memahami dan menguasai sistem fingerprint, serta diharapkan dapat mengikuti aturan yang berlaku dengan baik.



Setelah sosialisasi, implementasi kebijakan ini melibatkan penerapan sistem fingerprint untuk merekam waktu masuk kantor setiap ASN. Sistem fingerprint ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai masuk tepat waktu, menghindari adanya pelanggaran disiplin yang dapat merugikan kinerja instansi. Wawancara dengan Kepala BKD Provinsi Maluku menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil mendorong ASN untuk masuk kantor tepat waktu, dengan sebagian besar pegawai sudah dapat mengikuti aturan yang ada tanpa adanya keterlambatan signifikan. Penerapan sistem ini secara otomatis merekam waktu kehadiran setiap ASN dan membantu meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

Ketepatan waktu masuk kantor yang tercatat melalui sistem fingerprint menjadi salah satu aspek penting dalam menilai tingkat disiplin pegawai. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan juga mengungkapkan bahwa dengan penerapan sistem ini, ketepatan waktu pegawai untuk melakukan fingerprint semakin baik. Meskipun masih ada beberapa pegawai yang terlambat dengan alasan tertentu, secara keseluruhan, tingkat kedisiplinan ASN di BKD Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini juga terlihat dalam rekaman data kehadiran yang tercatat setiap hari, yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN kini lebih tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Menurut Kepala Sub Bagian Kepegawaian, penerapan sistem daftar hadir online terintegrasi telah mendorong ASN untuk disiplin dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya sistem ini, waktu kehadiran pegawai dapat dipantau setiap hari, dan hampir semua pegawai telah menunjukkan ketepatan waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, keterlambatan yang terjadi tidak lebih dari lima menit dan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti kondisi lalu lintas yang tidak dapat diprediksi. Dengan adanya data yang tercatat secara otomatis, pimpinan dapat memantau dan mengevaluasi kedisiplinan ASN dengan lebih efektif.

Selain itu, wawancara dengan petugas yang menangani data daftar hadir online, seperti Bapak Grenaldy Tahalele, menunjukkan bahwa data kehadiran yang tercatat melalui sistem fingerprint mencerminkan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Pegawai di BKD Provinsi Maluku secara umum telah mematuhi aturan terkait waktu masuk dan keluar kantor, yang tercermin dari rekaman data yang lebih teratur dan mudah diakses. Sistem ini telah mengurangi potensi kecurangan atau ketidaktepatan dalam pencatatan waktu kehadiran, serta memudahkan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN.

Fingerprint untuk pulang kantor merupakan bagian integral dari sistem daftar hadir online yang diterapkan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa pegawai pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku. Seperti halnya fingerprint untuk masuk kantor, sistem ini menjadi alat untuk mencatat waktu pulang pegawai dan mencegah potensi penyalahgunaan kehadiran, seperti pulang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Pimpinan BKD Provinsi Maluku, Ibu Halimah T. Soamole, menjelaskan bahwa pihaknya selalu mendorong pegawai untuk mematuhi waktu pulang yang telah ditentukan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah mematuhi ketentuan waktu pulang kantor dengan baik, tanpa ada yang pulang lebih awal dari yang seharusnya.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Bapak James T. Leiwakabessy, juga mengungkapkan bahwa sejak diterapkan sistem daftar hadir online terintegrasi, ketepatan waktu pulang pegawai telah meningkat. Kebijakan ini memastikan bahwa pegawai tidak meninggalkan kantor lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yang sebelumnya menjadi masalah dalam pengelolaan kehadiran. Dengan sistem fingerprint, setiap ketidaktepatan waktu pulang dapat tercatat secara otomatis, sehingga memudahkan pimpinan dalam memantau disiplin kerja pegawai dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ibu Warda Bantam, menambahkan bahwa dengan sistem daftar hadir online terintegrasi, pihaknya dapat memantau waktu pulang pegawai secara harian dan memastikan tidak ada yang pulang lebih cepat. Data yang tercatat setiap hari membantu dalam memantau kedisiplinan pegawai dan memudahkan evaluasi secara berkala. Hal



ini tidak hanya membantu dalam menegakkan disiplin, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kehadiran di BKD Provinsi Maluku.

Penerapan sistem ini juga mendapatkan dukungan dari pegawai yang bertugas menangani data daftar hadir online, seperti Bapak Grenaldy Tahalele, yang menyatakan bahwa fingerprint pulang kantor sama pentingnya dengan fingerprint masuk kantor. Sistem ini memastikan bahwa pegawai berada di kantor hingga waktu yang telah ditentukan dan berfungsi sebagai penanda ketepatan waktu pulang mereka. Dengan demikian, pegawai yang sudah mematuhi aturan waktu pulang dapat diakui, sementara yang melanggar akan tercatat dan dikenai sanksi.

Berdasarkan data dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem fingerprint untuk waktu pulang kantor di BKD Provinsi Maluku telah terbukti efektif dalam memastikan ketepatan waktu. Tidak ada lagi pegawai yang pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan, dan jika terjadi keterlambatan, itu hanya disebabkan oleh alasan yang dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan BKD, yang pada gilirannya berdampak positif pada produktivitas kerja dan kualitas pelayanan.

Perekapan data kehadiran menjadi elemen penting dalam mengelola kehadiran pegawai dan memberikan dasar yang kuat untuk penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta pemberian sanksi disiplin. Kepala BKD Provinsi Maluku menjelaskan bahwa dia secara rutin memantau data kehadiran yang dihimpun setiap hari maupun setiap bulan, untuk memastikan bahwa setiap pegawai mematuhi ketentuan waktu kerja yang berlaku. Selain itu, data kehadiran yang telah terrekam juga digunakan untuk tujuan administrasi lainnya, termasuk evaluasi kinerja pegawai.

Dalam hal ini, sistem daftar hadir online terintegrasi mempermudah proses perekapan data kehadiran pegawai. Dengan adanya aplikasi berbasis web, perekapan kehadiran dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan mesin fingerprint. Bapak Grenaldy Tahalele menyatakan bahwa proses ini mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual, yang sering kali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Data kehadiran yang tercatat secara otomatis dapat langsung digunakan untuk menghitung TPP dan sebagai dasar pemberian sanksi disiplin bagi pegawai yang tidak mematuhi waktu masuk dan pulang kantor. Selain itu, proses penyerahan rekapan data kehadiran juga menjadi lebih efisien, dengan hasil rekapan yang siap digunakan setiap bulannya untuk berbagai keperluan administrasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Sebagian besar pegawai di BKD Provinsi Maluku menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi terkait dengan waktu masuk kerja. Sebagian besar pegawai sudah datang tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pukul 08.00. Hanya ada sedikit pegawai yang terlambat, dengan alasan tertentu seperti keterlambatan angkutan umum. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kedisiplinan dalam hal waktu sangat baik di kalangan pegawai.

Selain itu, mayoritas pegawai juga menunjukkan ketepatan yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka. Alur pekerjaan di kantor berjalan lancar tanpa hambatan berarti, yang mencerminkan produktivitas tinggi dan disiplin yang baik. Ini menandakan bahwa sistem kerja yang diterapkan dapat mendukung pegawai dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa pegawai di BKD Provinsi Maluku mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan peraturan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Terkait dengan waktu pulang kantor, pegawai juga menunjukkan disiplin yang sangat baik. Tidak ada pegawai yang pulang lebih awal atau mendahului waktu yang telah ditentukan, yang mencerminkan tingginya kedisiplinan dalam mengikuti jam kerja yang berlaku. Ini menjadi indikasi bahwa penerapan kebijakan kedisiplinan di BKD telah berjalan dengan efektif, dan pegawai lebih sadar akan pentingnya mematuhi ketentuan waktu kerja, baik saat masuk maupun pulang kantor.

Dalam hal pembinaan disiplin kerja pegawai, BKD Provinsi Maluku menerapkan pendekatan yang tegas terhadap pegawai yang melanggar aturan. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur



bertanggung jawab untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dengan tujuan untuk menegakkan kedisiplinan di tempat kerja. Penerapan sanksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa tindakan disiplin dapat diterapkan dengan konsisten.

Pemberian penghargaan dan sanksi menjadi bagian dari kebijakan yang diterapkan di BKD. Pegawai yang menunjukkan kedisiplinan akan diberikan penghargaan berupa pengakuan publik dan tambahan penghasilan (TPP). Sebaliknya, pegawai yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi, seperti pemotongan TPP dan hukuman disiplin, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini mencerminkan penerapan kebijakan yang seimbang dan adil dalam menilai kinerja pegawai.

Implementasi kebijakan daftar hadir online terintegrasi di BKD Provinsi Maluku dimulai dengan sosialisasi sistem fingerprint kepada seluruh ASN. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan via Zoom, dengan tujuan agar ASN memahami dan dapat menguasai sistem baru ini dengan baik. Melalui sosialisasi, diharapkan setiap pegawai dapat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam penerapan sistem daftar hadir online, yang akan mempengaruhi kedisiplinan dan kinerja mereka.

Selanjutnya, implementasi sistem fingerprint diterapkan untuk mencatat waktu kehadiran pegawai saat masuk dan pulang kantor. Pegawai diwajibkan untuk melakukan fingerprint saat memasuki kantor dan saat pulang kantor. Sistem ini digunakan untuk mencatat waktu kedatangan dan kepulangan pegawai secara akurat, serta mencegah adanya pelanggaran seperti pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Perekapan data kehadiran yang tercatat melalui sistem ini memudahkan pihak BKD untuk mengelola data kehadiran pegawai dan digunakan untuk menghitung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin. Data kehadiran juga diserahkan setiap bulan untuk dievaluasi, baik untuk penghitungan TPP maupun untuk menentukan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, H. ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DAN PENGENDALIAN TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 10(1).
- Mulyani, Y. (2020). Penerapan Absensi Online Berbasis Android Pada Peningkatan Kedisiplinan Dan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil Pada Bidang Pai. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 6(1), 205-208.
- Munawaroh, N., & Hildayanti, M. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI DAFTAR HADIR ELEKTRONIK (DHE) OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISKOMINFO) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Putri, R. N., Rahmawati, A., & Iftidiani, D. (2023). Evaluasi Penerapan Inovasi Presensi Guru berbasis Online di Sekolah Dasar. *Jurnal Pengajaran Sekolah Dasar*, 2(2), 157-167.
- Subadi, W. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA ABSENSI ONLINE E-OFFICE DI BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA KANTOR SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 6(2), 780-795.
- Taofik, B., Sihabudin, A. A., & Henriyani, E. (2022). Implementasi Kebijakan Absensi Berbasis Online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Ulfa, L., & Suprastiyo, A. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Absensi Online. *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6(1), 6-10.